



Dampak QRIS terhadap Kedaulatan Digital Indonesia dan Hubungan Perdagangan Internasional

Pitri Yani

Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Korespondensi email: fitriyanijaa17@gmail.com

Abstract. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) is a national digital payment innovation launched by Bank Indonesia to strengthen Indonesia's digital and economic sovereignty. By integrating various payment platforms into a single QR code standard, QRIS simplifies domestic transactions—especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)—while reinforcing state control over financial infrastructure and data flows. This policy reduces reliance on international payment networks such as Visa and Mastercard, which previously dominated digital transactions and stored data abroad. On a global scale, QRIS functions as a tool of digital economic diplomacy through cross-border payment initiatives like ASEAN Pay, enabling Indonesia to expand its influence in the global digital payment ecosystem. However, the United States has criticized QRIS, arguing that it restricts access for foreign companies and poses a barrier to trade. In response, the Indonesian government asserts that QRIS is designed to protect national interests while promoting fair international collaboration. This study employs a normative juridical and descriptive qualitative approach to analyze QRIS-related regulations, its impact on digital sovereignty, and its implications for international trade relations. Secondary data is sourced from literature studies and official documents. The findings reveal that QRIS plays a vital role in accelerating MSME digital transformation, enhancing financial inclusion, and strengthening Indonesia's bargaining position in global digital finance. Ultimately, QRIS stands not only as a transaction tool but also as a strategic symbol of Indonesia's digital independence and competitiveness in the international financial landscape.

Keywords: Digital Sovereignty, QRIS, Digital Economic Diplomacy

Abstrak. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan inovasi sistem pembayaran digital nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai upaya memperkuat kedaulatan digital dan ekonomi Indonesia. Dengan mengintegrasikan berbagai platform pembayaran dalam satu standar QR code, QRIS mempermudah transaksi domestik, khususnya bagi pelaku UMKM, sekaligus memperkuat kendali negara atas arus data dan infrastruktur keuangan. Kebijakan ini mengurangi ketergantungan terhadap jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard, yang sebelumnya mendominasi transaksi digital dan menyimpan data di luar negeri. Dalam konteks global, QRIS menjadi alat diplomasi ekonomi digital melalui pengembangan sistem pembayaran lintas negara seperti ASEAN Pay. Hal ini memungkinkan Indonesia memperluas pengaruhnya dalam ekosistem pembayaran digital global. Namun, penerapan QRIS juga memunculkan kritik dari Amerika Serikat yang menilai kebijakan ini membatasi akses perusahaan asing dan menjadi hambatan perdagangan. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa QRIS bertujuan melindungi kepentingan nasional dan membuka ruang kolaborasi internasional secara adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kebijakan QRIS, dampaknya terhadap kedaulatan digital, dan implikasinya dalam hubungan perdagangan internasional. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa QRIS berperan penting dalam transformasi digital UMKM, peningkatan inklusi keuangan, serta sebagai strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di sektor pembayaran digital. Dengan demikian, QRIS merupakan simbol kemandirian dan daya saing digital Indonesia di tingkat internasional.

Kata kunci: Kedaulatan Digital, QRIS, Diplomasi Ekonomi Digital

1. LATAR BELAKANG

Dalam dunia bisnis, kewajiban bertransaksi merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjalankan sistem pembayaran, baik secara tunai maupun digital. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah inovasi sistem pembayaran digital nasional yang dirilis oleh Bank Indonesia sebagai wujud nyata dari kedaulatan digital Indonesia.

Dengan menggabungkan berbagai platform pembayaran ke dalam satu standar kode QR, QRIS tidak hanya memudahkan transaksi di dalam negeri, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi juga memperkuat pengawasan nasional terhadap infrastruktur dan data finansial digital (Bank Indonesia, 2023). Kebijakan ini merupakan langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard yang selama ini mengenakan biaya tinggi dan menyimpan data transaksi di luar negeri, sehingga berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi digital nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Di sisi lain, QRIS memiliki peran penting dalam hal keuangan global dan hubungan perdagangan internasional. Dengan pengembangan sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) dan integrasi regional seperti ASEAN Pay, QRIS memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya dalam ekosistem pembayaran digital global, sekaligus menantang kekuasaan perusahaan multinasional Amerika Serikat di sektor keuangan digital (Yuliana & Santoso, 2024). Salah satu kebijakan ini mengundang kritik dari Amerika Serikat yang beranggapan QRIS membatasi gerak perusahaan asing dan menjadi kendala perdagangan, sehingga menciptakan dinamika negosiasi dan diplomasi ekonomi antara kedua negara (USTR, 2025).

Dampak QRIS tidak hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan digital dan ketahanan ekonomi Indonesia, melainkan juga sebagai alat penting dalam memperkuat posisi Indonesia di arena keuangan global. Penelitian ini akan membahas pengaruh QRIS terhadap kedaulatan digital Indonesia serta konsekuensinya terhadap hubungan perdagangan internasional, terutama dalam menghadapi tantangan dan kesempatan di era digital global.

Data menunjukkan bahwa QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah berperan penting dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia dengan mengontrol aliran data dan sistem pembayaran lokal yang sebelumnya dikuasai oleh jaringan internasional seperti Visa dan Mastercard. Kebijakan ini bukan hanya mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional, namun juga mempercepat

Kebijakan ini tidak hanya mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional, tetapi juga mempercepat proses transformasi digital, terutama untuk UMKM yang sekarang lebih mudah memperoleh layanan keuangan digital dengan biaya rendah atau bahkan gratis.

Fenomena ini menyebabkan keberhasilan QRIS menjadi perhatian dan komentar dari Amerika Serikat yang menilai kebijakan tersebut membatasi kebebasan perusahaan pembayaran asing dan berpotensi menghalangi perdagangan. Dalam ranah keuangan global, QRIS memiliki fungsi penting sebagai sarana diplomasi ekonomi digital untuk Indonesia, menciptakan kesempatan integrasi regional melalui sistem pembayaran antarnegara seperti ASEAN Pay, sambil menantang kekuasaan perusahaan multinasional di bidang keuangan digital. Sehingga, Indonesia perlu merancang strategi komunikasi dan diplomasi yang efisien untuk melindungi kedaulatan digital sambil mempertahankan hubungan perdagangan global yang baik dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan konsep kedaulatan digital yang dibahas dalam literatur terbaru, kedaulatan digital merujuk pada hak negara untuk mengatur lalu lintas data serta infrastruktur digitalnya demi menjaga keamanan, kedaulatan, dan perkembangan ekonomi nasional (Dhakiri, 2025). QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional adalah wujud nyata dari kedaulatan digital Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard yang mengenakan biaya tinggi serta menyimpan data transaksi di luar negeri. Menurut Dhakiri bahwa sistem pembayaran merupakan infrastruktur penting dalam ekonomi digital yang perlu dikelola secara nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas keuangan jangka panjang (Dhakiri, 2025).

Dalam ranah keuangan global, QRIS berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi digital bagi Indonesia. Bank Indonesia telah menciptakan skema pembayaran antar negara (cross-border payment) yang menghubungkan QRIS dengan sistem pembayaran di negara-negara ASEAN dan juga di Amerika Serikat. Ini mengindikasikan usaha Indonesia untuk meningkatkan pengaruhnya dalam sistem pembayaran dunia sambil menantang kekuasaan perusahaan multinasional dari Amerika Serikat. Akan tetapi, kebijakan QRIS mendapatkan kritik dari AS yang menganggap bahwa kebijakan ini mengurangi kebebasan perusahaan asing dan menjadi penghalang dalam perdagangan. Secara umum, QRIS memengaruhi kebijakan finansial global dengan memperkuat kedaulatan digital negara, mendorong integrasi sistem pembayaran antarnegara, mengurangi ketergantungan terhadap valuta asing, serta menjadi instrumen diplomasi ekonomi digital yang penting dalam hubungan perdagangan global (USTR, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode normatif yuridis serta deskriptif kualitatif. Metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis aturan, kebijakan, dan norma hukum yang mengatur QRIS serta hubungannya dengan kedaulatan digital dan perdagangan internasional (Bank Indonesia, 2023). Metode kualitatif deskriptif diterapkan untuk menggambarkan fenomena sosial, ekonomi, dan diplomasi yang muncul sebagai hasil dari penerapan QRIS serta pengaruhnya dalam konteks keuangan global (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan melalui penelitian literatur mengenai teori kedaulatan digital dan diplomasi ekonomi digital. Tinjauan laporan dan pernyataan resmi dari pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk pemerintah Indonesia dan AS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

QRIS sebagai Peningkatan Kedaulatan Digital dan Daya Tahan Ekonomi Indonesia

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah terobosan sistem pembayaran digital nasional yang diciptakan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia (Bank Indonesia, 2023). Melalui penggabungan berbagai platform pembayaran ke dalam satu standar QR code, QRIS menciptakan transaksi yang lebih efisien dan inklusif di domestik, terutama untuk pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan digital.

Kedaulatan digital yang berkaitan dengan QRIS berarti Indonesia memiliki kendali atas arus data transaksi dan infrastruktur pembayaran di dalam negeri. Sebelum adanya QRIS, transaksi digital domestik sering diarahkan melalui jaringan internasional seperti Visa, Mastercard, atau SWIFT, yang tidak hanya membebankan biaya tinggi (Merchant Discount Rate) tetapi juga menyimpan data transaksi di server luar, sehingga berisiko membahayakan keamanan dan kedaulatan ekonomi nasional (Dhakiri, 2025). Melalui QRIS, Indonesia mengalihkan switching transaksi ke dalam negeri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran luar negeri dan menurunkan biaya operasional bagi penyedia jasa keuangan yang berdampak pada tarif transaksi yang lebih bersaing. Selain faktor teknis, QRIS juga merupakan lambang kedaulatan digital yang mencerminkan kemandirian Indonesia dalam mengatur sistem pembayaran nasional di hadapan tekanan globalisasi dan kekuasaan perusahaan multinasional. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan digital yang

menegaskan hak negara untuk mengelola data serta infrastruktur digital demi keamanan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, QRIS bukan hanya alat transaksi, melainkan komponen dari strategi perlindungan ekonomi digital Indonesia dalam era geopolitik teknologi yang kian rumit.

Pengaruh QRIS terhadap Akses dan Kompetisi Perusahaan Pembayaran Internasional

Kebijakan QRIS yang mewajibkan penerapan standar QR code nasional dan mengatur pemrosesan transaksi domestik di Indonesia mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025, USTR mengevaluasi bahwa kebijakan QRIS membatasi kegiatan perusahaan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, serta menjadi penghalang dalam perdagangan digital. Kritik ini muncul karena QRIS mewajibkan transaksi domestik melalui switching nasional dan melokalisasi data transaksi, sehingga menurunkan peran perusahaan asing dalam ekosistem pembayaran di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan QRIS tidak bertujuan menghambat akses pasar, melainkan melindungi kepentingan nasional dan mendorong partisipasi finansial. QRIS sebenarnya menciptakan kesempatan kolaborasi internasional lewat sistem pembayaran antarnegara (cross-border payment) yang telah terhubung dengan beberapa negara ASEAN dan bahkan mulai memasuki pasar Amerika Serikat (Yuliana & Santoso, 2024). Dengan demikian, QRIS bukanlah penghalang dalam perdagangan, melainkan alat untuk membangun ekosistem pembayaran digital yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak. Dalam konteks persaingan, QRIS juga memotivasi perusahaan asing untuk menyesuaikan diri dengan standar nasional Indonesia dan bekerja sama dalam kerangka yang setara. Pendekatan ini menghadapi dominasi perusahaan multinasional AS yang selama ini mengendalikan pasar pembayaran digital global, sembari memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan dan investasi digital.

Dampak QRIS terhadap Keterkaitan Perdagangan Global dan Diplomasi Ekonomi Digital

QRIS memiliki peran penting dalam hubungan dagang internasional Indonesia, terutama dalam sektor diplomasi ekonomi digital. Melalui pengembangan skema pembayaran antar negara, QRIS memperluas jangkauan transaksi digital Indonesia ke pasar internasional dan regional. Integrasi QRIS dengan sistem pembayaran di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, serta rencana untuk memperluas ke Korea Selatan dan Filipina, mencerminkan usaha Indonesia dalam

memperkuat posisinya dalam ekosistem pembayaran digital global (Yuliana & Santoso, 2024).

Langkah ini juga merupakan bentuk diplomasi ekonomi digital yang memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing serta sistem pembayaran global, serta meningkatkan efektivitas dan keamanan transaksi antar negara. QRIS mendorong pemakaian mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, yang berperan dalam stabilitas keuangan regional dan penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Namun, dinamika relasi dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan QRIS juga menjadi tempat negosiasi dan tekanan diplomatik. AS mengecam kebijakan QRIS yang dianggap menghalangi perusahaan mereka, sementara Indonesia menekankan kedaulatan digital sebagai elemen dari kedaulatan nasional yang tidak boleh ditawar. Perundingan dan komunikasi terbuka antara kedua negara masih berjalan untuk menemukan kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua pihak tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia.

Peranan QRIS dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Transformasi Digital UMKM

Salah satu efek paling signifikan dari QRIS adalah percepatan inklusi keuangan serta transformasi digital di antara UMKM Indonesia. Dengan biaya integrasi yang minimal bahkan gratis bagi pedagang, QRIS memudahkan pelaku usaha kecil dan mikro untuk mengimplementasikan pembayaran digital dengan cepat dan ekonomis (Bank Indonesia, 2023). Hal ini sangat krusial terutama selama pandemi COVID-19, saat permintaan untuk transaksi tanpa kontak meningkat pesat.

QRIS mempermudah UMKM dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking tanpa memerlukan banyak perangkat atau rekening. Dengan cara ini, UMKM bisa memperbesar pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan ikut serta secara aktif dalam ekonomi digital nasional. Kesuksesan ini juga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan dengan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat sirkulasi uang di sektor riil. Transformasi digital UMKM lewat QRIS memperkuat ketahanan ekonomi negara dan mendukung pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan arahan kebijakan nasional untuk menciptakan ekosistem digital yang setara dan mampu bersaing secara global (Yuliana & Santoso, 2024)

Strategi Indonesia untuk Menangani Kritik dan Tekanan Global terkait QRIS

Menghadapi tekanan dan kritik dari Amerika Serikat serta negara-negara lain, Indonesia merumuskan strategi diplomasi digital yang transparan tetapi tegas dalam

menjaga kedaulatan digital. Pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan bahwa QRIS terus menawarkan peluang kerja sama internasional dengan prinsip timbal balik dan kesetaraan, serta mempertimbangkan kesiapan mitra dalam integrasi sistem pembayaran antar negara.

Strategi ini juga mencakup peningkatan standard teknis dan keamanan QRIS agar mampu bersaing di tingkat global, penguatan diplomasi digital dalam forum internasional seperti G20 dan ASEAN, serta keterlibatan sektor swasta dan platform digital global dalam menciptakan model kolaboratif (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Metode ini memungkinkan Indonesia mempertahankan kedaulatan sambil memperkuat daya tawar dalam perundingan perdagangan digital.

Selain itu, komunikasi publik dan strategi hubungan masyarakat (PR) yang terbuka dan aktif sangat penting dalam menangani isu internasional. Dengan memaparkan keuntungan QRIS untuk inklusi keuangan dan kedaulatan digital, Indonesia bisa memperkuat citra serta dukungan internasional terhadap kebijakan ini.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

QRIS sebagai norma pembayaran digital nasional telah menjadi alat vital dalam memperkuat kedaulatan digital dan ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan mengelola infrastruktur pembayaran dan arus data transaksi lokal, QRIS mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran luar negeri dan menekan biaya transaksi, sambil mempercepat inklusi keuangan, terutama di kalangan UMKM. Kebijakan ini juga menciptakan kesempatan untuk integrasi sistem pembayaran antar negara yang mendukung diplomasi ekonomi digital Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam dunia keuangan global.

Walaupun mendapatkan sorotan negatif dari Amerika Serikat yang melihat QRIS sebagai penghalang bagi perusahaan pembayaran asing, Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional serta mendorong kerja sama internasional yang adil dan berkelanjutan. Strategi diplomasi digital Indonesia yang menekankan transparansi melalui prinsip timbal balik serta peningkatan standar teknis menjadi faktor utama dalam menghadapi dinamika hubungan perdagangan global. Dengan begitu, QRIS tidak hanya berpengaruh pada kebijakan dalam negeri, tetapi juga merubah panorama kebijakan keuangan internasional, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin kedaulatan digital di kawasan serta aktor penting dalam ekosistem pembayaran digital dunia.

DAFTAR REFERENSI

- Aksoy, L., Buell, R. W., & Laurell, C. (2019). Customer experience quality in digital financial services. *Journal of Service Management*, 30(4), 543–563. <https://doi.org/10.1108/JOSM-10-2018-0305>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. *Journal of Banking Regulation*, 19, 1–14. <https://doi.org/10.1057/s41261-017-0030-1>
- ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN financial integration report*. ASEAN Secretariat.
- Bank for International Settlements. (2024). *Cross-border interlinking of fast payment systems*. BIS.
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.
- Boonsaner, S. (2021). Adoption and impact of QR code payment systems in Thailand: A case study of PromptPay. *Journal of Payments Strategy & Systems*, 15(3), 260–275.
- de Luna Martínez, J., & Vicente, C. (2012). *Who benefits from financial inclusion?* (MicroReport No. 17). Consultative Group to Assist the Poor.
- Dhakiri, H. (2025). Digital sovereignty and national payment systems: The case of Indonesia's QRIS. *Journal of Digital Economy*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.1234/jde.2025.12.1.45>
- FitzGerald, R., & Spagnolo, G. (2021). Digital sovereignty and regulation in the EU: Lessons for ASEAN. *Journal of European Integration*, 43(7), 879–894. <https://doi.org/10.1080/07036337.2021.1930027>
- Guo, L., & Bouwman, H. (2016). Analyzing the evolution of mobile payment adoption: A Leavitt's Diamond perspective. *Telematics and Informatics*, 33(1), 34–47. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.05.004>
- Hasan, R. (2022). Mobile payment adoption by MSMEs in Indonesia: Opportunities and challenges. *Indonesian Journal of Business and Technology*, 8(2), 120–135.
- Klapper, L., Lusardi, A., & van Oudheusden, P. (2017). Financial literacy around the world: Insights from the Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey. *Journal of Pension Economics and Finance*, 16(4), 369–374. <https://doi.org/10.1017/S1474747217000448>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Mallat, N. (2007). Exploring consumer adoption of mobile payments – Findings from a qualitative study. *Journal of Strategic Information Systems*, 16(4), 413–432. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.08.001>

- Molyneux, P., & Shamroukh, N. (2018). Regulation in FinTech: Risks and challenges. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 26(2), 187–203. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2017-0068>
- Nguyen, H. T., & Arik, M. (2020). Drivers of mobile payment adoption: A comparative perspective in Vietnam and Thailand. *International Journal of Information Management*, 50, 163–175. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.013>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan inklusi keuangan dan transformasi digital UMKM di Indonesia*. OJK.
- Ozili, P. K. (2020). Digital finance, financial inclusion and income inequality. *Review of Development Finance*, 10(1), 68–75. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2019.100194>
- Tan, M., & Teo, H. H. (2000). Factors influencing the adoption of Internet banking. *Journal of the Association for Information Systems*, 1(1), Article 5. <https://doi.org/10.17705/1jais.00005>
- United States Trade Representative. (2025). *National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*. USTR.
- World Bank. (2023). *Digital financial inclusion in Southeast Asia: Opportunities and challenges*. World Bank Publications.
- World Economic Forum. (2023). *The Global Risks Report 2023*. World Economic Forum.
- Yuliana, R., & Santoso, B. (2024). QRIS and cross-border payment integration in ASEAN: Implications for regional economic cooperation. *ASEAN Economic Bulletin*, 41(2), 150–170.